

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

594 TAHUN 2025

TENTANG

PETA MANGROVE NASIONAL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.926/MENLHK/PDASHL/DAS.1/ 10/2021 telah ditetapkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Amar KEDUA Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.926/MENLHK/PDASHL/DAS.1/10/2021, Peta dan Data Mangrove Nasional dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Amar KETIGA Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.926/MENLHK/PDASHL/DAS.1/10/2021, hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Menteri Kehutanan tentang Peta Mangrove Nasional Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Nomor 23 Tahun
 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.926/MENLHK/PDASHL/DAS.1/10/2021 tentang Peta Mangrove Nasional 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETA MANGROVE NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Data luas Mangrove Eksisting dan Potensi Habitat Mangrove Tahun 2024 untuk setiap provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Februari 2025

A.N. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REMABILITASI

DYAH MURTININGSIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
- 2. Menteri Kehutanan;
- 3. Menteri Lingkungan Hidup;
- 4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 5. Kepala Badan Informasi Geospasial;
- 6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 7. Gubernur Seluruh Indonesia;
- 8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR: 594 TAHUN 2025

TENTANG PETA MANGROVE NASIONAL

TAHUN 2024

DATA LUAS MANGROVE EKSISTING DAN POTENSI HABITAT MANGROVE TAHUN 2024

NO.	PROVINSI	EKSISTING MANGROVE (Ha)	LUAS POTENSI HABITAT MANGROVE (Ha)
SUM	ATERA		
1	ACEH	31.772	28.918
2	SUMATERA UTARA	61.430	14.465
3	SUMATERA BARAT	16.531	1.211
4	RIAU	231.438	12.234
5	KEPULAUAN RIAU	66.943	4.991
6	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	66.712	9.556
7	BENGKULU	2.621	1.939
8	JAMBI	12.018	667
9	SUMATERA SELATAN	173.114	44.052
10	LAMPUNG	10.797	307
JAW	Å		
11	BANTEN	3.750	10.702
12	DKI JAKARTA	608	39
13	JAWA BARAT	12.429	39.039
14	JAWA TENGAH	16.100	42.862
15	D.I. YOGYAKARTA	14	12
16	JAWA TIMUR	30.839	43.795
BALI	-NUSRA		
17	BALI	2.330	189
18	NUSA TENGGARA BARAT	11.032	4.050
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22.935	2.020
KALI	MANTAN		
20	KALIMANTAN BARAT	162.516	14.056
21	KALIMANTAN TENGAH	46.408	18.240
22	KALIMANTAN SELATAN	81.266	31.474
23	KALIMANTAN TIMUR	240.870	110.867
24	KALIMANTAN UTARA	189.740	136.549
SUL	AWESI		
25	SULAWESI UTARA	12.014	1.389
26	GORONTALO	8.970	14.102

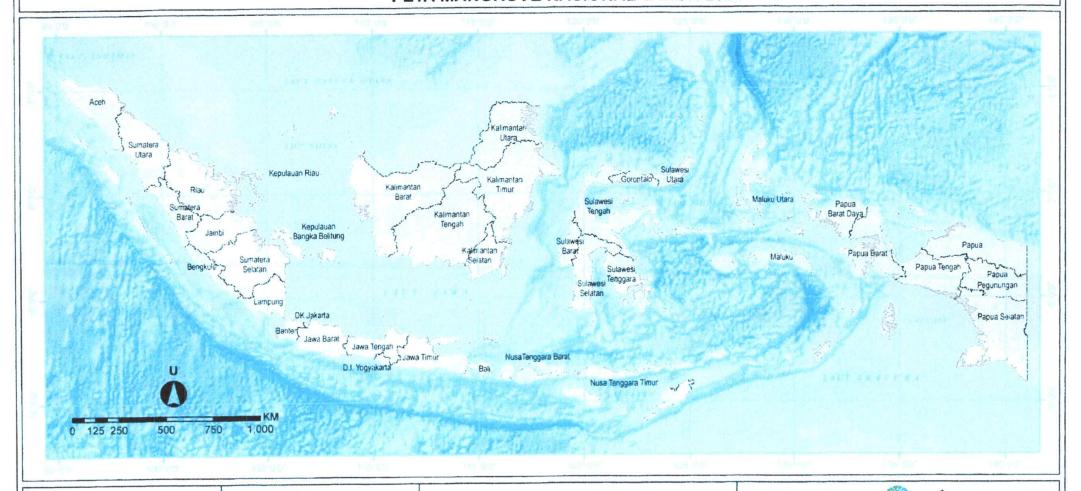
NO.	PROVINSI	EKSISTING MANGROVE (Ha)	LUAS POTENSI HABITAT MANGROVE (Ha)
27	SULAWESITENGAH	38.064	12.434
28	SULAWESI BARAT	3.491	2.457
29	SULAWESI SELATAN	10.800	124.561
30	SULAWESITENGGARA	65.141	29.001
KEP.	MALUKU		-
31	MALUKU UTARA	47.783	850
32	MALUKU	188.955	140
PAPL	JA		
33	PAPUA	162.262	2.894
34	PAPUA BARAT	326.593	978
35	PAPUA BARAT DAYA	154.285	3.429
36	PAPUA TENGAH	303.820	2.660
37	PAPUA SELATAN	624.075	2.696
	JUMLAH (Ha)	3.440.464	769.824

A.N. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN

SUNGAI DAN REHABILITASI

DYAH MURTININGSIH

PETA MANGROVE NASIONAL TAHUN 2024



LEGENDA

- ---- Batas Negara
 - Batas Provinsi

Kelas Tutupan Tajuk

- Mangrove Lebat (>70%)
 - Mangrove Sedang (30-70%)

Mangrove Jarang (<30%)

DASAR DAN SUMBER DATA:

- 1. Citra Sentinel 2 Tahun 2024
- 2. Citra Planet Tahun 2024
- 3. Peta RBI Skala 1:25.000
- 4. Peta RBI Skala 1:50.000

DISUSUN OLEH:















DYAH MURTININGSIH



